



# **RENJA PD 2024**

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

### **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

**Jl. Ahmad Yani No. 25 Lumajang  
Telp. (0334) 893193/887465, Fax. (0334) 893193  
Email : [bkd@lumajangkab.go.id](mailto:bkd@lumajangkab.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024 ini dengan baik.

Renja PD di buat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang di tahun 2024. Tentunya hal tersebut dibutuhkan perencanaan kerja yang baik agar sasaran dan tujuan dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Renja PD tahun 2024 ini. Semoga rencana kerja ini bisa terlaksana dengan baik.

Lumajang, Juni 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.  
NIP. 19660710 199203 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD .....	32
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	45
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah .....	45
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>52</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	52
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.3 Program dan Kegiatan .....	55
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>71</b>
4.1 Rencana Kerja .....	71
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renja PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 3 (tiga) tahunan yang dibuat oleh Perangkat Daerah. Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Renja PD ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2024-2026 dan awal dari kebijakan selama tiga tahun mendatang.

Dalam hal menyusun rencana kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan tentu melalui proses yang sesuai dengan tupoksi perangkat daerah itu sendiri. Dengan menerjemahkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta memperhatikan landasan hukum yang mendasari maka program dan kegiatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah merupakan kumpulan dari program dan kegiatan masing-masing sekretariat dan bidang pada perangkat daerah dan harus dipertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud saat tahun anggaran berakhir.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah telah ditetapkan setiap tahun dan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan RKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat.

Memperhatikan landasan perencanaan suatu pembangunan yang menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pengaturannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan lima tahunan diperlukan rencana penganggaran setiap tahunnya yang dituangkan dalam renstra perangkat daerah. Hal tersebut untuk memudahkan menghitung kebutuhan dan ketersediaan dana di dalam APBD.

Selanjutnya RKPD memiliki nilai strategis yang merupakan acuan Kepala Daerah dalam rangka menyusun Kebijakan anggaran yang menjadi dasar penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2024.

Renja PD 2024 merupakan penjabaran dari Renstra PD Kabupaten Lumajang dengan memuat rencana kinerja pembangunan yang ingin dicapai, fenomena yang ada dan isu-isu strategis yang akan dihadapi.

Rencana Kerja sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang:

- a. Arahan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Merupakan acuan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan rencana kebutuhan belanja kegiatan dan program serta pencapaian rencana pendapatan;
- c. Merupakan alat evaluasi pelaksanaan kinerja sejauh mana tercapainya hasil kegiatan dan program dalam tahun dimaksud.

Analisis kinerja Perangkat Daerah merupakan evaluasi terhadap target capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak atas kinerja tersebut dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Renja PD yang disusun berdasarkan kondisi riil kebutuhan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan memberikan kontribusi pada penyusunan RAPBD yang akuntabel.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024 ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
  - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
  - t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  - u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  - v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D)
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
  - x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - y. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
  - z. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- aa. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- bb. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;
- cc. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 109 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja PD tahun 2024 ini adalah :

- a. Menjabarkan Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;
- b. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka pendek;
- c. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas pada Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Mendorong sistem kerja yang yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja;
- e. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana dalam pelayanan kepegawaian di Kabupaten Lumajang.

Adapun tujuannya :

- a. Merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yang di wujudkan dalam jangka waktu pendek;
- b. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. Mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang dicapai di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis;
- e. Memberi jaminan yang kongrit, jelas dan logis kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan aktivitas pelayanan kepegawaian di Kabupaten Lumajang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja PD Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I       PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisa



- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaianan Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, memuat Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V PENUTUP, memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaianan Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Capaian kinerja tahun 2022 terdapat program dan kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya :

a. Program Kepegawaian Daerah, capaian pada tahun 2022 tidak mencapai target yang ditentukan, dengan beberapa indikator yang antara lain:

- 1) Prosentase Pelayanan Kepegawaian sebesar 86.13% dengan target 90%;
- 2) Persentase ASN memiliki Pendidikan sesuai kualifikasi sebesar 65.56% dengan target 66%;
- 3) Persentase ASN yang memiliki kinerja baik sebesar 91.07% dengan target 94%.
- 4) Persentase ASN yang tidak melakukan indisipliner sebesar 98.45% dengan target 99%.

Adapun faktor yang mempengaruhi ialah masih kurang maksimalnya penggunaan layanan kepegawaian secara keseluruhan, belum sadarnya ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikannya, kurang sosialisasi terhadap peraturan baru terkait SKP sehingga pemahaman ASN terkait kinerja masih kurang, dan masih kurangnya pembinaan terhadap ASN sehingga masih ada ASN yang terkena HD.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, capaian pada tahun 2022 tidak mencapai target yang ditentukan, dengan indikator Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia dan realisasinya 69.82% yang mana targetnya 80%. Faktor yang mempengaruhi ialah kurangnya kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh ASN baik itu yang dilakukan secara mandiri maupun yang dibiayai pemerintah.

Penyebab lainnya juga karena terbatasnya anggaran diklat sehingga pelaksanaan diklat tidak dapat maksimal.

Capaian target Program baik yang telah mencapai target maupun belum dapat tercapai berkat komitmen Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder yang terkait dalam mendukung program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada dokumen perencanaan. **(Tabel. T-C. 29)**

Tabel 2.1. T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat at Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	<b>URUSAN</b>									
5.03	<b>I KEPEGAWAIAN</b>									
	<b>PROGRAM</b>									
5.03.02	<b>A. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Prosentase Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>90 Perse % n</b>	<b>65 Perse % n</b>	<b>90 Perse % n</b>	<b>86,1 Perse 3% n</b>	<b>95,7 0%</b>	<b>90% Perse n</b>	<b>80, Perse 4% n</b>	<b>89,3 1%</b>
		<b>Persentase ASN yang Memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi</b>	<b>67 Perse % n</b>	<b>80 Perse % n</b>	<b>66 Perse % n</b>	<b>65,5 Perse 6% n</b>	<b>99,3 3%</b>	<b>67% Perse n</b>	<b>70, Perse 9% n</b>	<b>105, 75%</b>
		<b>Persentase ASN yang memiliki kinerja baik</b>	<b>95 Perse % n</b>	<b>73 Perse % n</b>	<b>94 Perse % n</b>	<b>91,0 Perse 7% n</b>	<b>96,8 8%</b>	<b>95% Perse n</b>	<b>86, Perse 4% n</b>	<b>90,9 0%</b>
		<b>Persentase ASN yang melakukan indisipliner</b>	<b>99 Perse % n</b>	<b>90 Perse % n</b>	<b>99 Perse % n</b>	<b>98,4 Perse 5% n</b>	<b>99,4 4%</b>	<b>99% Perse n</b>	<b>95, Perse 8% n</b>	<b>96,7 8%</b>
		<b>Indikator baru :</b>								
		<b>Indeks kualifikasi pendidikan ASN</b>	<b>11, Angk 74 a</b>	<b>11, Angk 71 a</b>	<b>11, Angk 73 a</b>	<b>12,2 Angk 6 a</b>	<b>104, 5%</b>	<b>11,7 Angk 4 a</b>	<b>11, Angk 90 a</b>	<b>101, 4%</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)	
		<b>Indeks Kinerja ASN</b>	<b>24,00 Angka</b>	<b>23,65 Angka</b>	<b>23,80 Angka</b>	<b>24,24 Angka</b>	<b>101,8%</b>	<b>24,00 Angka</b>	<b>23,96 Angka</b>	<b>99,8%</b>	
		<b>Indeks Disiplin ASN</b>	<b>4,93 Angka</b>	<b>4,91 Angka</b>	<b>4,92 Angka</b>	<b>4,83 Angka</b>	<b>98,2%</b>	<b>4,93 Angka</b>	<b>4,89 Angka</b>	<b>99,2%</b>	
		<b>Indeks Kompetensi ASN</b>	<b>26,08 Angka</b>	<b>26,04 Angka</b>	<b>26,06 Angka</b>	<b>13,8 Angka</b>	<b>53,0%</b>	<b>26,08 Angka</b>	<b>21,97 Angka</b>	<b>84,3%</b>	
		<b>KEGIATAN</b>									
5.03.02.2.01	1.	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan	83,3 %	82,9 %	83,3 %	81,20 %	97,48 %	83,30 %	82%	99%
			Persentase ASN yang menerima pensiun	85%	62,2 %	85%	82%	96,47 %	85%	76%	89,88 %
			Persentase Sistem Informasi yang dikelola	86%	56,9 %	86%	87%	101%	86%	77%	89,11 %
			Persentase ASN yang terfasilitasi Dokumen Kepegawaian	95%	100 %	95%	81,82 %	86,13 %	95%	92%	97,13 %
			<b>Rasio Ketersediaan ASN</b>	<b>53,1 %</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
		<b>SUB. KEGIATAN</b>									
5.03.02.2.01.03	a.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan dan PPPK PNS	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	102 Dokumen	333 Dokumen	345 Dokumen	636 Dokumen	184,3 %	345 Dokumen	438 Dokumen	42,8 %

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
5.03.0 2.2.01. 06	b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	165 Doku 8 men	510 Doku men	574 Doku men	720 Doku men	125,4 %	574 Doku men	601 Doku men	36,3 %
5.03.0 2.2.01. 07	c. Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.03.0 2.2.01. 08	d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	12 Lemb aga	4 Lemb aga	4 Lemb aga	5 Lemb aga	125,0 %	4 Lemb aga	4 Lemb aga	36,1 %
5.03.0 2.2.01. 10	e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	33 Doku men	11 Doku men	11 Doku men	11 Doku men	100%	11 Doku men	11 Doku men	33,3 %
5.03.0 2.2.01. 11	f. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	126 Doku 28 men	0 Doku men	631 Doku 4 men	6314 Doku men	100%	6314 Doku men	420 Doku 9 men	33,3 %
5.03.0 2.2.01. 12	g. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>KEGIATAN</b>									
5.03.0 2.2.02	<b>2. Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase Dokumen Penataan Karier	88%	93%	88%	97%		88%	93%	105,3 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)	
		sesuai dengan Persyaratan Jabatan									
		Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 %	100 %	100 %	100%		100%	100 %	100,0 %	
		<b>Persentase Penataan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat sesuai Persyaratan</b>	<b>65 N/A %</b>	<b>N/A N/A</b>	<b>N/A N/A</b>	<b>N/A N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A N/A</b>	<b>N/A N/A</b>	<b>N/A</b>	
		<b>SUB. KEGIATAN</b>									
5.03.0 2.2.02. 01	a.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	88 Doku men	28 Doku men	30 Doku men	30 Doku men	100%	30 Doku men	29 Doku men	33%
5.03.0 2.2.02. 02	b.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	100%	2 Doku men	2 Doku men	33%
5.03.0 2.2.02. 03	c.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	100%	4 Doku men	4 Doku men	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	<b>KEGIATAN</b>									
5.03.0 2.2.03	<b>3. Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase ASN yg mengikuti diklat utk meningkatkan Kompetensinya	100 %	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
		<b>Persentase ASN yang Terlayani Pengembangan Kompetensinya</b>	<b>9%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									
5.03.0 2.2.03. 02	a. Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.03.0 2.2.03. 03	b. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.03.0 2.2.03. 05	c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
5.03.0 2.2.03. 06	d. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
5.03.0 2.2.03. 07	e.	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.03.0 2.2.03. 08	f.	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.03.0 2.2.03. 09	g.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.03.0 2.2.03. 14	h.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>KEGIATAN</b>								
5.03.0 2.2.04	4.	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	Persentase Arsip dokumen SKP	55%	50%	55%	55%	100%	55%	68%
			Persentase penyelesaian dokumen Disiplin ASN	91%	90%	91%	91%	100%	91%	102,93%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)	
		Persentase ASN yang mendapatkan penghargaan	81%	80%	81%	81%	100%	81 %	87%	107,41%	
		<b>Persentase ASN yang terevaluasi Kinerjanya</b>	<b>92 %</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	
		<b>Persentase Penurunan Hukuman Disiplin</b>	<b>4,5 %</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	
		<b>SUB. KEGIATAN</b>									
5.03.02.2.04.01	a.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.03.02.2.04.02	b.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	186 Doku 39 men	655 Doku 1 men	604 Doku 4 men	6133 Doku men	101,5 %	6044 Doku men	624 Doku 3 men	33,5 %
5.03.02.2.04.03	c.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
5.03.0 2.2.04. 04	d. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 orang 00	606 orang	700 orang	468 orang	66,9 %	700 orang	591 orang	3,0%
5.03.0 2.2.04. 05	e. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.03.0 2.2.04. 07	f. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	260 orang 0	800 orang	900 orang	939 orang	104,3 %	900 orang	880 orang	33,8 %
5.03.0 2.2.04. 08	g. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	170 Laporan	50 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100%	60 Laporan	57 Laporan	33,3 %
5.03.0 2.2.04. 09	h. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>URUSAN</b>									
5.04	<b>II</b>									
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
	<b>PROGRAM</b>									
5.04.0 2	<b>B. PROGRAM PENGEMBANGAN</b>	<b>Persentase Pengembangan SDM</b>	<b>80 %</b>	<b>83 %</b>	<b>80 %</b>	<b>69,8 2%</b>	<b>87,2 8%</b>	<b>80%</b>	<b>78 %</b>	<b>97,0 5%</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
	<b>KEGIATAN</b>									
5.04.02.2.01	1. Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	5,54%	3%	5,54%	5,17%	93%	5,54%	N/A	N/A
		Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									
5.04.02.2.01.03	a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	892 Orang	180 Orang	350 Orang	41 Orang	11,7%	350 Orang	190 Orang	21%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
5.04.02.2.01.04	b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	460 Dokumen	100 Dokumen	180 Dokumen	184 Dokumen	102,2 %	180 Dokumen	155 Dokumen	34%
	<b>KEGIATAN</b>									
5.04.02.2.02	<b>2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi</b>	Persentase ASN Struktural yang memiliki kompetensi dan sertifikasi	<b>80 %</b>	<b>60,5%</b>	<b>80 %</b>	<b>64%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	68%	85%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	<b>Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									
5.04.02.2.02.05	a. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	13 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	4 Dokumen	33%
5.04.02.2.02.07	b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	371 Laporan	71 Laporan	150 Laporan	187 Laporan	125%	150 Laporan	136 Laporan	37%
	<b>URUSAN</b>									
	<b>III URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PROGRAM</b>									

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX. 01	<b>C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>KEGIATAN</b>									
X.XX. 01.2.0 1	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									
X.XX.0 1.2.01. 01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	100%	2 Doku men	2 Doku men	33%
X.XX.0 1.2.01. 02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Doku men	1 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	100%	2 Doku men	2 Doku men	28%

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX.0 1.2.01. 03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	100%	2 Doku men	2 Doku men	50%
X.XX.0 1.2.01. 06	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	100%	1 Lapor an	1 Lapor an	6%
X.XX.0 1.2.01. 07	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Lapor an	5 Lapor an	5 Lapor an	5 Lapor an	100%	5 Lapor an	5 Lapor an	33%
	<b>KEGIATAN</b>									
X.XX. 01.2.0 2	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX.0 1.2.02. 01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 orang /bulan	55 orang /bulan	55 orang /bulan	55 orang /bulan	100%	55 orang /bulan	55 orang /bulan	33%
X.XX.0 1.2.02. 02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	33%
X.XX.0 1.2.02. 04	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33%
X.XX.0 1.2.02. 05	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	33%
X.XX.0 1.2.02. 07	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	50%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		<b>KEGIATAN</b>								
X.XX.01.2.03	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
		<b>SUB. KEGIATAN</b>								
X.XX.01.2.03.01	a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X.XX.01.2.03.05	b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<b>KEGIATAN</b>								
X.XX.01.2.05	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		<b>SUB. KEGIATAN</b>								

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX.0 1.2.05. 02	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	3 Paket	3 Paket	0	0%	3 Paket	2 Paket	22%
X.XX.0 1.2.05. 03	b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X.XX.0 1.2.05. 09	c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>KEGIATAN</b>									
X.XX. 01.2.0 6	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									
X.XX.0 1.2.06. 01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33%

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX.0 1.2.06. 02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X.XX.0 1.2.06. 03	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X.XX.0 1.2.06. 04	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	33%
X.XX.0 1.2.06. 05	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	33%
X.XX.0 1.2.06. 06	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	7 Doku men	1 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	100%	3 Doku men	2 Doku men	33%
X.XX.0 1.2.06. 07	g. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	2 Paket	33%
X.XX.0 1.2.06. 08	h. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	0 Lapo ran	0%	1 Lapo ran	1 Lapo ran	22%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX.0 1.2.06. 09	i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	33%
	<b>KEGIATAN</b>									
X.XX. 01.2.0 7	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	67%	<b>67%</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									
X.XX.0 1.2.07. 05	a. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X.XX.0 1.2.07. 06	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	2	33%
	<b>KEGIATAN</b>									
X.XX. 01.2.0 8	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Reali sasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX.0 1.2.08. 01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	33%
X.XX.0 1.2.08. 02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	48%
X.XX.0 1.2.08. 03	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X.XX.0 1.2.08. 04	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	33%
	<b>KEGIATAN</b>									
X.XX. 01.2.0 9	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>									

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun (n-1) 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingk at Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
X.XX.0 1.2.09. 02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	100%	31 Unit	31 Unit	33%
X.XX.0 1.2.09. 06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	33%
X.XX.0 1.2.09. 09	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	0,3	6%

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam analisa kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, telah dijabarkan indikator penetapan kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024. **(Tabel T-C. 30)**

Tabel 2.2. T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

No	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\frac{10-(9+6)}{2}$	11	12	13
	<b>Tujuan</b>											
1	Indeks Sistem Merit	N/A	N/A	N/A	0,65	0,70	0,75	0,65	0,65	0,70	0,75	
	<b>Sasaran</b>											
1	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	66,51	66,75	56,35	56,72	55,13	60,94	56,72	57,06	-
	<b>Sasaran (Prenstra)</b>											
1	Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN	N/A	N/A	11,73	11,74	12,26	12,27	12,26	12,00	12,26	12,27	-
2	Meningkatnya Kinerja ASN	N/A	N/A	23,80	24,00	24,25	24,40	24,24	24,12	24,25	24,40	-
3	Meningkatnya Disiplin ASN	N/A	N/A	4,92	4,93	4,84	4,85	4,83	4,88	4,84	4,85	-
4	Meningkatnya Kompetensi ASN	N/A	N/A	26,06	26,08	15,00	15,20	13,80	19,94	15,00	15,20	-

Sebagaimana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- pelaksanaan pengadaan pegawai, pensiun, pemberhentian penyusunan database kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan arsip kepegawaian dan pengembangan profesi ASN;

- d. penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karier pegawai;
- e. perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan analisis kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, dengan berdirinya Badan Kepegawaian Daerah banyak sekali tantangan dan hambatan yang dilalui oleh Badan Kepegawaian Daerah, tetapi dengan berjalannya waktu dengan segenap kemampuan yang ada selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja menjadi lebih baik. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain:

#### a. Kekuatan (**STRENGTHS**)

- 1) Kebijakan dan komitmen yang kuat;
- 2) Sarana dan prasarana yang memadai;
- 3) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai;
- 5) Motivasi dan inovasi dalam bekerja yang kuat.

#### b. Kelemahan (**WEAKNESSES**)

- 1) Belum optimalnya strategi pelayanan kepegawaian yang disusun;
- 2) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pelayanan kepegawaian daerah;
- 3) Kurang optimalnya aplikasi pelayanan kepegawaian.

#### c. Peluang (**OPPORTUNITIES**)

- 1) Dukungan data ASN yang sudah elektronik dan terintegrasikan;
- 2) Perkembangan teknologi dalam mendukung *Smart City*;
- 3) Komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan Profesionalitas ASN di Kabupaten Lumajang.

#### d. Tantangan (**THREATS**)

- 1) Perubahan peraturan Perundang-Undangan yang sering sehingga berimbas kepada peraturan di Daerah yang berubah pula;
- 2) Perkembangan teknologi dalam mendukung *Smart City* untuk menciptakan inovasi-inovasi yang up to date.



Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah antara lain :

Tabel 2.3.  
Isu-isu Strategis

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1. Kurangnya Pengembangan Kompetensi Aparatur; 2. Belum Optimalnya Penilaian Kinerja Aparatur; 3. Masih Rendahnya Kepatuhan Aparatur Terhadap Peraturan Yang Berlaku; 4. Belum Sesuainya Kualifikasi Pendidikan Dengan Tugas dan Fungsi.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang antara lain :

a. Permasalahan Bidang Pelayanan kesekretariatan

Beberapa Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Kesekretariatan, sebagai berikut :

- 1) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (Gudang Penyimpanan Berkas dan perlengkapan/peralatan);
- 2) Ruang pelayanan yang kurang representatif;
- 3) Adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia.

b. Permasalahan Bidang Mutasi dan Promosi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi, sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kesadaran ASN dalam melengkapi dokumen kepegawaian di SIMAK;
- 2) Adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia;
- 3) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana;
- 4) Belum tercukupinya SDM bidang teknis.

c. Permasalahan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, sebagai berikut:

- 1) Adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia;
- 2) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana;
- 3) Pelaksanaan pembinaan secara daring kurang optimal;
- 4) Adanya perubahan peraturan terkait penilaian kinerja;
- 5) Belum maksimalnya kegiatan bimtek terkait penilaian kinerja.

d. Permasalahan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya kemampuan dalam pengiriman peserta diklat dan assessment;
- 2) Masih ditemui pejabat yang enggan untuk dikirim diklatpim;
- 3) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana;
- 4) Adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia;
- 5) Kurang optimalnya monev pasca diklat.

e. Permasalahan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengadaan, pemberhentian dan Informasi, sebagai berikut :

- 1) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana;
- 2) Juknis pelaksanaan kegiatan dari Pusat tidak sesuai jadwal;
- 3) Kurangnya upgrade Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
- 4) Kurangnya tenaga teknologi informasi.

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan pilar dasar penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telaahan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan sehingga penyelenggaraan reformasi birokrasi juga belum optimal. Prinsip dasar dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang hemat struktur namun kaya fungsi. Guna mewujudkannya diperlukan perencanaan, pengembangan kapasitas aparatur, pola karir yang transparan serta pembinaan pegawai sesuai norma-norma kepegawaian yang ada.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada **(Tabel T-C. 31)**. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4. T-C.31.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023  
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN</b>					<b>URUSAN</b>					
5.03	<b>I KEPEGAWAIAN</b>					<b>KEPEGAWAIAN</b>					
	<b>PROGRAM</b>					<b>PROGRAM</b>					
5.03.02	<b>A PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	BK D	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	12,26	592.202.500	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	BK D	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	13,00	518.287.560	
			Indeks Kinerja ASN	24,25	106.060.000			Indeks Kinerja ASN	25,75	99.582.000	
			Indeks Disiplin ASN	4,84	91.294.700			Indeks Disiplin ASN	4,95	93.414.000	
			Indeks Kompetensi ASN	15,00	-			Indeks Kompetensi ASN	35,00	-	
				56,35	789.557.200				78,70	711.283.560	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
5.03.02.2.01	<b>1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	BK D	Rasio Ketersediaan ASN	53,1	376.375.500	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	BK D	Rasio Ketersediaan ASN	53,1	347.810.560	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
5.03.02.2.01.02	a Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	8.100.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	8.100.000	
5.03.02.2.01.03	b Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BK D	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	750 Dokumen/ASN	234.527.500	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BK D	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	750 Dokumen/ASN	207.612.560	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.0 3.0 2.2. 01. 06	c Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	450 Dokumen	30.400.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	450 Dokumen	28.750.000	
5.0 3.0 2.2. 01. 08	d Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKD	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga	45.576.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKD	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga	45.576.000	
5.0 3.0 2.2. 01. 10	e Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11 Dokumen	30.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11 Dokumen	30.000.000	
5.0 3.0 2.2. 01. 11	f Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	23.856.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	23.856.000	
5.0 3.0 2.2. 01. 12	g Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan	3.916.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan	3.916.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
5.0 3.0 2.2. 02	<b>2 Mutasi dan Promosi ASN</b>	BKD	<b>Persentase Penataan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat sesuai Persyaratan</b>	<b>65%</b>	<b>215.827.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	BKD	<b>Persentase Penataan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat sesuai Persyaratan</b>	<b>65%</b>	<b>170.477.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
5.0 3.0 2.2. 01	a Pengelolaan Mutasi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	10 Dokumen	117.780.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	12 Dokumen	117.780.000	

Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Mutasi ASN Antar Daerah								
5.0 3.0 2.2. 02. 02	b Pengelolaan . Kenaikan Pangkat ASN	BK D	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Doku men	40.327.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BK D	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6Doku men	19.977.000	
5.0 3.0 2.2. 02. 03	c Pengelolaan . Promosi ASN	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Doku men	57.720.000	Pengelolaan Promosi ASN	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Doku men	32.720.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
5.0 3.0 2.2. 04	<b>4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	BK D	<b>Persentase ASN yang terevaluasi Kinerjanya</b>	<b>92%</b>	<b>106.060.000</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	BK D	<b>Persentase ASN yang terevaluasi Kinerjanya</b>	<b>92%</b>	<b>99.582.000</b>	
		BK D	<b>Persentase Penurunan Hukuman Disiplin</b>	<b>4,50%</b>			<b>91.294.700</b>	BK D	<b>Persentase Penurunan Hukuman Disiplin</b>		<b>4,50%</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
5.0 3.0 2.2. 04. 02	a Pelaksanaan . Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7053 Doku men	90.700.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7053 Doku men	88.200.000	
5.0 3.0 2.2. 04. 03	b EvaluasiHasil . Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Lapora n	15.360.000	EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Lapora n	11.382.000	
5.0 3.0 2.2. 04. 04	c Pengelolaan . Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BK D	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	17.373.200						
5.0 3.0 2.2. 04. 05	d Pengelolaan Tanda . Jasa bagi Pegawai	BK D	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	5.884.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BK D	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	5.884.000	

Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.0 3.0 2.2. 04. 07	e Pembinaan Disiplin ASN	BK D	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	800 Orang	53.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	BK D	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	800 Orang	73.400.000	
5.0 3.0 2.2. 04. 08	f Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BK D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 Lapora n	5.925.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BK D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 Lapora n	5.580.000	
5.0 3.0 2.2. 04. 09	g Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BK D	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Doku men	9.112.500	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BK D	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Doku men	8.550.000	
	<b>URUSAN</b>					<b>URUSAN</b>					
<b>5.0 4</b>	<b>I PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
	<b>PROGRAM</b>					<b>PROGRAM</b>					
<b>5.0 4.0 2</b>	<b>B PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Pengembangan SDM</b>	<b>50%</b>	<b>1.154.395.250</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Pengembangan SDM</b>	<b>50%</b>	<b>1.153.175.250</b>	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
<b>5.0 4.0 2.2. 01</b>	<b>1 Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>8%</b>	<b>456.913.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>8%</b>	<b>455.693.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
5.0 4.0 2.2. 01. 03	a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	BK D	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	35 Orang	227.533.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	BK D	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	40 Orang	226.313.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
5.0 4.0 2.2. 01. 04	b Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40 Dokumen	229.380.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40 Dokumen	229.380.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
5.0 4.0 2.2. 02	<b>2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	BKD	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional</b>	<b>65%</b>	<b>697.482.250</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	BKD	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional</b>	<b>65%</b>	<b>697.482.250</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					



Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.0 4.0 2.2. 02. 05	a Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	BK D	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	18 Doku men	112.000.000	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	BK D	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Doku men	112.000.000	
5.0 4.0 2.2. 02. 07	b Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BK D	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	824 Lapora n	585.482.250	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BK D	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	46 Lapora n	585.482.250	
	<b>URUSAN</b>					<b>URUSAN</b>					
	<b>I URUSAN I PENUNJANG I URUSAN PEMERINTAH</b>					<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>					
	<b>PROGRAM</b>					<b>PROGRAM</b>					
X.X X.0 1	<b>C PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	BK D	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>6.483.993.601</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	BK D	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>6.271.686.601</b>	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 01	<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	BK D	<b>Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>19.500.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	BK D	<b>Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>19.500.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					

Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.X X.0 1.2. 01. 01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BK D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BK D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	6.000.000	
X.X X.0 1.2. 01. 02	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BK D	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BK D	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	4.000.000	
X.X X.0 1.2. 01. 03	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BK D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Doku men	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BK D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Doku men	2.000.000	
X.X X.0 1.2. 01. 06	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BK D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapora n	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BK D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapora n	2.000.000	
X.X X.0 1.2. 01. 07	e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BK D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Lapora n	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BK D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Lapora n	5.500.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 02	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BK D	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.966.071.058</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BK D	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.966.071.058</b>	

Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 02. 01	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BK D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang /12 Bulan	4.894.083.058	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BK D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang /12 Bulan	4.894.083.058	
X.X X.0 1.2. 02. 02	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Doku men	67.488.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Doku men	67.488.000	
X.X X.0 1.2. 02. 04	c Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 2 Doku men	1.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BK D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Doku men	1.000.000	
X.X X.0 1.2. 02. 05	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BK D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BK D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	2.000.000	
X.X X.0 1.2. 02. 07	e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BK D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Lapora n	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BK D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Lapora n	1.500.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					

Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.X X.0 1.2. 03	<b>3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 03. 05	a Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BK D	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lapora n	1.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BK D	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lapora n	1.000.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 05	<b>4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.917.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.917.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 05. 03	a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BK D	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	4.917.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BK D	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	4.917.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 06	<b>6 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>352.389.943</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BK D</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>340.738.943</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 06. 01	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BK D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.902.527	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BK D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.902.527	
X.X X.0 1.2. 06. 04	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BK D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	145.035.908	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BK D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	133.404.908	

Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.X X.0 1.2. 06. 05	c Penyediaan Barang . Cetakan dan Penggandaan	BK D	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.133.508	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BK D	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.133.508	
X.X X.0 1.2. 06. 07	d Penyediaan . Bahan/Material	BK D	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	13.761.000	Penyediaan Bahan/Material	BK D	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	13.761.000	
X.X X.0 1.2. 06. 08	e Fasilitasi . Kunjungan Tamu	BK D	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora n	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BK D	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora n	10.000.000	
X.X X.0 1.2. 06. 09	f Penyelenggaraan . Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BK D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	143.557.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BK D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	143.537.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 07	<b>7 Terpenuhinya . Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	BK D	<b>Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>37.079.000</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	BK D	<b>Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>37.079.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 07. 06	a Pengadaan . Peralatan dan Mesin Lainnya	BK D	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	37.079.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BK D	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	37.079.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 08	<b>8 Penyediaan Jasa . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BK D	<b>Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>693.947.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BK D	<b>Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>693.441.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 08. 01	a Penyediaan Jasa . Surat Menyurat	BK D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapora n	3.891.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BK D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lapora n	3.891.000	

Ko de	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.X X.0 1.2. 08. 02	b Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BK D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	350.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BK D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	349.494.000	
X.X X.0 1.2. 08. 04	c Penyediaan Jasa . Pelayanan Umum Kantor	BK D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	340.056.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BK D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	340.056.000	
	<b>KEGIATAN</b>					<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 09	<b>9 Pemeliharaan . Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BK D	<b>Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>409.089.600</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	BK D	<b>Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>208.939.600</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.X X.0 1.2. 09. 02	a Penyediaan Jasa . Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BK D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	142.389.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BK D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	142.389.600	
X.X X.0 1.2. 09. 06	b Pemeliharaan . Peralatan dan Mesin Lainnya	BK D	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	66.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BK D	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	66.550.000	
X.X X.0 1.2. 09. 09	c Pemeliharaan/ . Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BK D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BK D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.X X.0 1.2. 09. 10	d Pemeliharaan/ . Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BK D	Tumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BK D	Tumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	-	
<b>A.</b>	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				<b>789.557.200</b>					<b>711.283.560</b>	
<b>B.</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				<b>1.154.395.250</b>					<b>1.153.175.250</b>	
<b>C.</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				<b>6.483.993.601</b>					<b>6.271.686.601</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>8.427.946.051</b>					<b>8.136.145.411</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari pelaksana Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tidak melakukan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat yang dapat dilihat pada **(Tabel T-C. 32)** dengan isian *nihil*.

Tabel 2.5. T-C.32.

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lumajang Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaia Daerah Kabupaten Lumajang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>

## 2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan sasaran peningkatan pelayan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang melakukan beberapa inovasi dalam upaya meningkatkan Profesionalitas ASN Kabupaten Lumajang melalui inovasi sebagai berikut:

### a. SIPERLU (Sistem Informasi Presensi Lumajang)

#### 1) Latar Belakang dan Permasalahan

Latar belakang adanya SIPERLU adalah adanya presensi manual yang dilakukan ASN melalui pengisian kolom presensi dengan tanda tangan. Melalui presensi manual tersebut, ditengarai adanya manipulasi data/ pengkondisian presensi ASN yang tidak sesuai dengan kehadiran ASN yang sebenarnya sehingga data yang dilaporkan kurang akurat dan penerapan presensi manual tersebut tidak mendukung upaya peningkatan disiplin ASN sesuai Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

#### 2) Tujuan

Melihat kondisi tersebut, Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lumajang melakukan inovasi Sistem Presensi secara elektronik yang diberi nama SIPERLU. SIPERLU adalah Sistem Informasi berbasis aplikasi android.



Aplikasi tersebut sangat mudah digunakan melalui gawai masing-masing ASN dimana ASN dapat melakukan presensi ketika posisinya sudah sesuai lokasi OPD yang sudah ditentukan dan sesuai jam kerja yang berlaku. Sejauh ini SIPERLU sudah tahap penerapan sejak tahun 2018 hingga saat ini, adapun jenis inovasi berupa digital dan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan Profesionalitas ASN.

### 3) Manfaat

Masing-masing ASN dapat mengisi aktifitas harian yang dilakukan dan langsung bisa dipantau oleh atasan langsungnya. Setelah diberlakukan SIPERLU, data presensi dan data akyifitas harian ASN yang tersaji bisa dijamin keakuratannya karena ASN yang melakukan presensi dan yang tidak melakukan presensi kehadirannya benar-benar dapat dibedakan datanya secara nyata. Sehingga semakin mudah dalam melakukan control pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat kehadiran ASN.

### 4) Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

- ASN mengajukan user presensi kepada admin OPD
- Admin OPD menginput data dan mengajukan presensi baru kepada admin Badan Kepegawaian Daerah
- Admin BKD memeriksa data kelengkapan dokumen

### 5) Kendala Pelaksanaan Inovasi

Masih ada handphone yang terkadang masih belum support dengan aplikasi SIPERLU dan masih terus diproses dalam upaya mengoptimalkan aplikasi tersebut.

## b. SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian)

### 1) Latar Belakang dan Permasalahan

SIMAK adalah Sistem Informasi berbasis web yang sangat mudah digunakan masing-masing ASN. ASN dapat melakukan update data secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Sejauh ini SIMAK sudah tahap penerapan sejak tahun 2017 hingga saat ini, adapun jenis inovasi berupa digital dan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan keakuratan data kepegawaian. Latar belakang adanya inovasi SIMAK adalah data masih dihimpun secara manual sehingga sering terjadi perbedaan data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah dengan data yang ada dimasing-masing OPD. Melihat kondisi tersebut, Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lumajang melakukan Inovasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian).

### 2) Tujuan

Untuk mewujudkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dan paperless.

3) Manfaat

Setelah diberlakukan SIMAK, data kepegawaian dan dokumen kepegawaian digital masing-masing menjadi lebih update. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang memiliki data dan dokumen digital masing-masing ASN yang akurat dan update. Data tersebut juga terintegrasi dan digunakan untuk mendapatkan layanan kepegawaian lainnya.

4) Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

- Pegawai melakukan login ke aplikasi SIMAK dengan memasukkan user name dan password;
- Pegawai melengkapi data kepegawaiannya.

5) Kendala Pelaksanaan Inovasi

Masih ada ASN yang masih belum mengupdate dan melengkapi data kepegawaiannya secara berkala pada Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaiannya.

c. E-Berkala

1) Latar Belakang dan Permasalahan

E-berkala merupakan modul aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, digunakan untuk mempermudah, mempercepat proses validasi dan verifikasi penerbitan surat kenaikan gaji berkala.

2) Tujuan

Memudahkan verifikasi dan validasi data sebelum penerbitan surat kenaikan gaji berkala baru dan Penerbitan Surat kenaikan gaji berkala tepat waktu sebelum TMT Berkala.

3) Manfaat

Mempercepat proses verifikasi dan validasi surat kenaikan gaji berkala dan Penerbitan Surat kenaikan gaji berkala tepat waktu sebelum TMT Berkala.

4) Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

- Memfilter Prediksi Berkala Berdasarkan Bulan di E-berkala;
- Memverifikasi data PNS yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- Melengkapi data Kepegawaian di SIMAK;
- Memvalidasi draft Surat Kenaikan Gaji Berkala;
- Mencetak Arsip;
- Paraf Hirarki Kasubid;
- Kenaikan Gaji Berkala Golongan III/d Kebawah, tanda tangan kapid, IV/a dan IV/b paraf kapid;
- Kenaikan Gaji Berkala Golongan IV/a dan IV/b tanda tangan Ka. BKD, IV/c keatas paraf;

- Tanda tangan arsip kenaikan gaji berkala golongan IV/c keatas;
- Terbitkan Surat kenaikan Gaji Berkala yang sudah di tanda tangan pimpinan;
- Arsipkan Arsip Surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah di tanda-tangan pimpinan;
- Download Surat kenaikan gaji berkala di SIMAK.

#### 5) Kendala Pelaksanaan Inovasi

Kendala pada Aplikasi ini apabila data ASN pada SIMAK belum lengkap atau belum mengupdate maka admin e-berkala tidak bisa memproses e-berkala karena aplikasi ini terintegrasi dengan SIMAK.

#### d. E-Pangkat

##### 1) Latar Belakang dan Permasalahan

E-Pangkat, pengusulan kenaikan pangkat dari OPD sejak kenaikan pangkat periode 1 April 2019 sudah paperless menggunakan E-Pangkat.

##### 2) Tujuan

E-Pangkat merupakan modul aplikasi yang terintegrasi dengan SIMAK BKD Lumajang, digunakan untuk mempermudah, mempercepat dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat secara paperless.

##### 3) Manfaat

- Admin OPD dapat dengan segera mengetahui status usulan, serta melengkapi kekurangan berkas bila ada;
- Mempercepat proses verifikasi berkas oleh admin pangkat;
- Pengelola kepegawaian OPD dapat mengetahui status usulan dan kekurangan berkas yang harus dilengkapi segera melalui E-Pangkat;
- Data kepegawaian pada SIMAK BKD Lumajang terupdate secara realtime setelah penerbitan dan penyerahan SK Pangkat selesai.

##### 4) Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan e-pangkat adalah sebagai berikut :

- Membuat Surat Usulan Kenaikan Pangkat yang ditujukan kepada Bupati dan Tembusan Kepala BKD;
- Mengupload surat usulan di e-pangkat;
- Menginput NIP PNS yang diusulkan untuk naik pangkat kedalam E-pangkat
- Memeriksa surat usulan yang masuk di e-pangkat dan memverifikasi berkas usulan kenaikan pangkat PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkatnya jika memenuhi syarat status usulan dirubah menjadi MS jika tidak BTL dan dikembalikan untuk diperbaiki;
- Mendownload daftar usulan yang dinyatakan MS maupun TMS dan melaporkan ke kasubid untuk diperiksa;

- Memeriksa daftar usulan jika setuju perintahkan untuk mendownload berkas kelengkapan di e-pangkat, jika tidak perintahkan untuk cek kembali kelengkapan berkas;
- Mendownload kelengkapan berkas persyaratan kenaikan pangkat;
- Membuat surat usulan kenaikan pangkat di SAPK BKN dan mendownload surat usulan;
- Mencetak surat usulan dari SAPK dan menyerahkan ke kasubid untuk diperiksa dan paraf hirarki;
- Memeriksa surat usulan jika sudah sesuai paraf dan serahkan ke kabid untuk paraf hirarki, jika tidak perintahkan untuk revisi surat usulan di SAPK;
- Memeriksa surat usulan jika sudah sesuai paraf dan serahkan ke sekretaris untuk paraf hirarki, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memeriksa surat usulan jika sudah sesuai ajukan untuk tanda-tangan Kepala BKD, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memeriksa dan menandatangani surat usulan, jika tidak sesuai kembalikan surat usulan;
- Mendokumentasikan surat usulan yang telah disetujui Kepala BKD;
- Menginput nomor surat usulan ke aplikasi Arek Online Kanreg II BKN;
- Mengupload list PNS yang diusulkan dan mengupload berkas kelengkapan ke AREK Online Kanreg II BKN;
- mencukupi berkas yang dinyatakan tidak lengkap di AREK Online Kanreg II BKN;
- Mendownload Nomor Persetujuan Teknis BKN tentang kenaikan pangkat dari aplikasi NCSIS BKN;
- Mengupload File Persetujuan Teknis BKN tentang kenaikan pangkat ke E-Pangkat;
- Mencetak SK Bupati Tentang Kenaikan Pangkat, dan ajukan paraf hirarki ke kasubid;
- Memeriksa SK Bupati tentang kenaikan pangkat, jika telah sesuai paraf dan lanjutkan untuk paraf kabid, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memeriksa SK Bupati tentang kenaikan pangkat, jika telah sesuai paraf, dan lanjutkan untuk paraf sekretaris, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memeriksa SK Bupati tentang kenaikan pangkat, jika telah sesuai paraf, jika tidak kembalikan untuk revisi;
- Memasukkan surat ke subag umum untuk proses paraf hirarki lebih lanjut dan tanda tangan BUPATI di sekretariat daerah;
- Mendokumentasikan SK Bupati Tentang Kenaikan Pangkat;

- Mencetak Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS, dan mengajukan untuk paraf hirarki;
- Memeriksa Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS, jika telah sesuai paraf, jika tidak kembalikan untuk revisi (mulai kasubid s/d Ka BKD);
- Mengarsipkan Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### 5) Kendala Pelaksanaan Inovasi

Kendala pada Aplikasi ini apabila data ASN pada SIMAK belum lengkap atau belum mengupdate maka admin E-Pangkat tidak bisa memproses E-Pangkat karena aplikasi ini terintegrasi dengan SIMAK.

#### e. Simantun Tanduk

##### 1) Latar Belakang dan Permasalahan

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, khususnya Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian membuat inovasi berupa aplikasi Simantun Tanduk dalam menangani pensiun.

##### 2) Tujuan

Penanganan pensiun yang semula menggunakan berkas fisik secara manual, kini telah menggunakan berkas digital yang diunggah melalui akun simak admin kepegawaian. PNS tadinya tidak mengetahui progres pengerjaan SK Pensiun, sekarang dapat melihat progres pengerjaannya.

##### 3) Manfaat

Pegawai Negeri Sipil tidak lagi datang ke Badan Kepegawaian Daerah membawa berkas fisik sebagai syarat pemberkasan. Indikator keberhasilan dari inovasi ini yaitu PNS dapat melihat progres pengerjaan SK sampai diterimanya SK tersebut oleh yang bersangkutan. Selain menerima SK pensiun, PNS juga mendapatkan data KTP dan KK terbaru.

##### 4) Alur / mekanisme / SOP Pelaksanaan Inovasi

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan SIMANTUN TANDUK antara lain sebagai berikut :

- BKD Menerima berkas digital masuk yang dikirimkan oleh OPD tentang Pengajuan Pensiun bagi PNS yang akan memasuki masa Pensiun melalui aplikasi E-MANTUN;
- BKD merekap usulan pensiun yang di ajukan oleh admin OPD. Apabila berkas tidak lengkap usulan akan di kembalikan ke OPD untuk di lengkapi. Untuk berkas yang sudah lengkap kemudian ditindak lanjuti dan di proses untuk di usulkan ke BKN;
- Meminta Nomor surat dan pembuatan pengajuan usulan pensiun melalui aplikasi SAPK milik BKN;

- Menginput data-data pegawai yang akan di usulkan pensiun di aplikasi SAPK;
- Pembuatan Draft surat pengantar pengajuan usulan pensiun kepada pimpinan. Yang nantinya di upload di sistem bersamaan dengan pengajuan berkasnya;
- Meng-upload berkas digital usulan pegawai ke aplikasi DOCU dan AREK serta surat pengantar pensiun ke sistem. Agar di verifikasi oleh BKN;
- Berkas di terima dan di verifikasi oleh BKN apabila berkas ada yang tidak sesuai di kembalikan untuk di perbaiki apabila sudah lengkap dan sesuai untuk di tindak lanjuti dan di proses;
- Berkas yang memenuhi syarat akan di terbitkan SK Pensiunnya melalui SAPK dan di cetak;
- Memeriksa dan membubuhkan paraf serta meneruskan SK Pensiun untuk mendapat TTD Bupati, setelah kembali maka SK di scan untuk di upload di SIMAK;
- Pemberitahuan kepada PNS atau ahli waris melalui SIPERLU, bahwa SK dapat di ambil.

#### 5) Kendala Pelaksanaan Inovasi

Kendala pada Aplikasi ini apabila data ASN pada SIMAK belum lengkap atau belum mengupdate maka admin tidak bisa memproses Simantun Tanduk karena aplikasi ini terintegrasi dengan SIMAK.

#### f. Sistem Uji Kompetensi Mandiri Online (SIJI KOMANDO)

SIJI KOMANDO digagas untuk merespon permasalahan yang ada terhadap kurangnya pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Luamajang dan dilator belakangi terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi juga keengganan dari masing-masing ASN untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem yang sederhana dapat digunakan untuk banyak orang dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja, baik melauli computer maupun ponsel pribadi (online

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah yang selanjutnya di jadikan dasar arah kebijakan dan Prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah. pada tahun 2023 Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan dilaksanakan secara daring.

RKP 2024 adalah RKP tahun pertama dalam konteks rencana pembangunan tiga tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2026. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) diantaranya: PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan; PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 7 Prioritas Pembangunan Jawa Timur yang telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional tahun 2024. Tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur pada 2024 adalah : Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata; penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar; peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan; peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal; peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi; peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tema RKPD Kabupaten yakni " Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk

percepatan pembangunan berkelanjutan” dengan 6 prioritas pembangunan Daerah yang telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Enam Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada 2024 adalah : Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian dan pariwisata; penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan; peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar; peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; peningkatan konduktivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki 11 program prioritas berkelanjutan yang antara lain:

- a. Pelayanan melahirkan gratis bagi masyarakat miskin di fasyankes pemerintah
- b. Penyediaan air bersih di daerah rawan air terutama di wilayah utara
- c. Pemberian seragam dan SPP gratis bagi siswa miskin disekolah Pendidikan Dasar Negeri (SD dan SMP)
- d. Melanjutkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang sudah terdaftar pada program sebelumnya.
- e. Pemberian tambahan penghasilan untuk guru Non NIP
- f. Pengadaan CCTV pada daerah rawan laka lantas dan kriminalitas serta pemeliharaan CCTV yang sudah ada
- g. Optimalisasi perpustakaan Mulamanurung sebagai ruang kreativitas.
- h. Rehabilitasi gedung soedjono sebagai ruang gallery UMKM
- i. Pemberdayaan karangtaruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat
- j. Pembangunan ruang terbuka hijau layak anak
- k. Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaki investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian.

Dari Program Strategis yang telah dijabarkan pada tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah mendukung salah satu dari 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang yaitu Program Strategis nomor 19 yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun pada tahun 2024 telah ada perubahan program strategis pada Kabupaten Lumajang.

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah antara lain yaitu: Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pelaksanaan manajemen PNS mengalami



perubahan yang cukup fundamental dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Jenis kepegawaian dalam Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara aturan pelaksanaan dari Undang-undang ASN tersebut masih ada yang belum diterbitkan diantaranya pola karier, penggajian dan tunjangan, Rekrutmen PPPK, Talentpool, Sertifikasi profesi, sehingga sangat mungkin terjadi banyak kerancuan dalam tataran pelaksanaan manajemen PNS di daerah.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun tujuan Renstra PD merupakan implementasi dari sasaran RPD yaitu Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Renstra PD yaitu Meningkatnya Profesionalitas ASN.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah tertuang dalam **Tabel 3.2** dibawah ini :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan  
Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	-	Indeks Sistem Merit	Angka	$(Asp1+Asp2+Asp3+Asp4+Asp5+Asp6+Asp7+Asp8) / \text{Nilai Keseluruhan Aspek}$	0,70	0,75	0,81
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	$\sum IPi = IP1+IP2+IP3+IP4$	56.6 5	56.7 2	57.0 6

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berikut adalah penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran di Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah 2024-2026.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

- a. Program Kepegawaian Daerah;
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Manusia. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan, sebesar **Rp 8.136.145.411,00** adapun untuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada **(Tabel T-C. 33)** sebagai berikut.

Tabel 3.3. T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>URUSAN</b>											
5.03	<b>I KEPEGAWAIAN</b>											
	<b>PROGRAM</b>											
5.03.02	<b>A. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks kualifikasi pendidikan ASN</b>			BKD	13,00	518.287.560	DAU		13,00	638.443.150	DAU
		<b>Indeks Kinerja ASN</b>			BKD	25,75	99.582.000	DAU		30,00	116.666.000	DAU
		<b>Indeks Disiplin ASN</b>			BKD	4,95	93.414.000	DAU		4,99	81.313.650	DAU
		<b>Indeks Kompetensi ASN</b>			BKD	35,00	-	DAU		35,00	-	DAU
						78,70	711.283.560			82,99	836.422.800	
	<b>KEGIATAN</b>											
5.03.02.2.01	<b>1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Rasio Ketersediaan ASN</b>			BKD	53,1	347.810.560	DAU		55,76	412.811.450	DAU
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
5.03.02.2.01.02	a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Workshop penyusunan rencana kebutuhan ASN tahun 2024		BKD	3 Dokumen	8.100.000	DAU		3 Dokumen	8.100.000	DAU
					BKD	3 Dokumen	8.100.000					
5.03.02.2.01.03	b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	Workshop penyusunan rencana kebutuhan ASN tahun 2024		BKD	750 Dokumen/ ASN	207.612.560	DAU		800 Dokumen/ ASN	257.980.250	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan PNS dan PPPK	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD	1 org/bulan	21.600.000					
			Rakor persiapan pengadaan PPPK	2	BKD	1 kegiatan	1.125.000					
			Fasilitasi pengadaan PPPK	3	BKD	750 org	106.540.000		Periode pengadaan ASN dapat berubah sewaktu waktu sesuai Keputusan Menpan dan BKN			
			Penyerahan PPPK	SK 4	BKD	750 org	78.347.560		Penyerahan SK PPPK mengacu pada periode pengusulan NIP PPPK (Surat BKN)			
5.03.02.2.01.06	c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			BKD	450 Dokumen	<b>28.750.000</b>	DAU		500 Dokumen	<b>33.440.000</b>	DAU
			Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD	1 org/bulan	20.400.000					
			Sosialisasi ketaspenan	2	BKD	1 kegiatan	8.350.000		Sosialisasi Ketaspenan dan Perbankan dengan sasaran PNS yang akan menjelang Purna Tugas dengan tujuan memberi penjelasan mengenai pensiunan,taspen, dan perbankan			
5.03.02.2.01.08	e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi		1	BKD	4 Lembaga	<b>45.576.000</b>	DAU		4 Lembaga	<b>50.133.600</b>	DAU
			Pembayaran Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD	2 org/bln	43.200.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Id Card ASN	2	BKD	1000 Id Card	2.376.000					
5.03.02.2.01.10	f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			BKD	11 Dokumen	<b>30.000.000</b>	DAU		11 Dokumen	<b>33.000.000</b>	DAU
			Pemeliharaan Server dan Jaringan	1	BKD	11 paket	30.000.000					
5.03.02.2.01.11	g. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			BKD	12 Dokumen	<b>23.856.000</b>	DAU		12 Dokumen	<b>26.241.600</b>	DAU
			Tenaga Upah Bulanan	1	BKD	1 org/ bln	20.400.000					
			Pengelolaan dan verifikasi data	2	BKD	12 dokumen	3.456.000					
5.03.02.2.01.12	h. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			BKD	2 Laporan	<b>3.916.000</b>	DAU		2 Laporan	<b>3.916.000</b>	DAU
			Evaluasi Data dan evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian	1	BKD	2 Laporan	3.916.000					
	<b>KEGIATAN</b>											
5.03.02.2.02	<b>2. Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Penataan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat sesuai Persyaratan</b>			<b>BKD</b>	<b>65%</b>	<b>170.477.000</b>	<b>DAU</b>		<b>66%</b>	<b>225.631.700</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
5.03.02.2.02.01	a. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,			BKD	12 Dokumen	<b>117.780.000</b>	DAU		15 Dokumen	<b>117.780.000</b>	DAU
			Fasilitasi Baperjakat	1	BKD	12 fasilitasi	48.300.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Koordinasi dan Pelantikan Sertijab	2	BKD	12 laporan	8.100.000		Terdapat honor baperjakat			
			Pelantikan	3	BKD	8 kegiatan	47.240.000					
			Sertijab	4	BKD	4 kegiatan	14.140.000					
5.03.02.2.02.02	b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			BKD	6 Dokumen	<b>19.977.000</b>	DAU		2 Dokumen	<b>44.359.700</b>	DAU
			Bimtek Kenaikan Pangkat Elektronik (E-Pangkat)	1	BKD	1 kegiatan	12.400.000					
			Fasilitasi Kenaikan Pangkat	2	BKD	6 fasilitasi	7.577.000					
5.03.02.2.02.03	c. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			BKD	4 Dokumen	<b>32.720.000</b>	DAU		4 Dokumen	<b>63.492.000</b>	DAU
			Pembayaran TKB	1	BKD	1 org/ bln	20.400.000					
			Pemetaan talenta dan Pelaksanaan Ujian Dinas	2	BKD	1 kegiatan	9.330.000					
			Pemetaan Dokumen Talenfull	3	BKD	1 kegiatan	2.990.000					
	<b>KEGIATAN</b>											
5.03.02.2.04	<b>3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang terevaluasi Kinerjanya</b>			<b>BKD</b>	<b>92%</b>	<b>99.582.000</b>	<b>DAU</b>		<b>92%</b>	<b>116.666.000</b>	<b>DAU</b>
		<b>Persentase Penurunan Hukuman Disiplin</b>			<b>BKD</b>	<b>4,50%</b>	<b>93.414.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4,70%</b>	<b>81.313.650</b>	<b>DAU</b>
							<b>192.996.000</b>				<b>197.979.650</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03.02.2.04.02	a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			BKD	7053 Dokumen	<b>88.200.000</b>	DAU		6648 Dokumen	<b>99.770.000</b>	DAU
			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	BKD	2 Orang	43.200.000					
			Bimbingan Teknis SKP	2	BKD	5 Kegiatan	45.000.000					
5.03.02.2.04.03	b. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			BKD	2 Laporan	<b>11.382.000</b>	DAU		2 Laporan	<b>16.896.000</b>	DAU
			Monitoring dan Evaluasi	1		2 laporan	11.382.000					
5.03.02.2.04.05	d. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			BKD	200 Orang	5.884.000	DAU		200 Orang	<b>6.472.400</b>	DAU
			Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya	1		200 Orang	5.884.000					
5.03.02.2.04.07	e. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			BKD	800 Orang	<b>73.400.000</b>	DAU		800 Orang	<b>58.300.000</b>	DAU
			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	BKD	2 Orang	42.000.000					
			Pembinaan Disiplin ASN	2	BKD	800 Orang	16.400.000					
			Booklet Peraturan Kepegawaian	3	BKD	300 buku	15.000.000					
5.03.02.2.04.08	f. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			BKD	60 Laporan	<b>5.580.000</b>	DAU		60 Laporan	<b>6.517.500</b>	DAU
			Memproses penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	1	BKD	60 Dokumen	780.000					
			Monitoring Pelanggaran Disiplin)	2	BKD	30 laporan	4.800.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03.02.2.04.09	g. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			BKD	30 Dokumen	<b>8.550.000</b>	DAU		29 Dokumen	<b>10.023.750</b>	DAU
			Konseling Perkawinan	2	BKD	30 fasilitasi	8.550.000					
	<b>URUSAN</b>											
5.04	<b>II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											
	<b>PROGRAM</b>											
5.04.02	<b>B. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase Pengembangan SDM</b>			<b>BKD</b>	<b>50%</b>	<b>1.153.175.250</b>	<b>DAU</b>		<b>55%</b>	<b>1.338.369.742</b>	<b>DAU</b>
	<b>KEGIATAN</b>											
5.04.02.2.01	<b>1. Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			<b>BKD</b>	<b>8%</b>	<b>455.693.000</b>	<b>DAU</b>		<b>8%</b>	<b>525.049.542</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
5.04.02.2.01.03	a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			BKD	40 Orang	<b>226.313.000</b>	DAU		40 Orang	<b>272.731.542</b>	DAU
			Pembayaran Upah Tenaga Bulanan	1	BKD	2 org/ bln	40.800.000					
			Pelatis Dasar manajemen Bencana	2	BKD	40 orang	185.513.000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.04.02.2.01.04	b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			BKD	40 Dokumen	<b>229.380.000</b>	DAU		3 Dokumen	<b>252.318.000</b>	DAU
		Asesment Kompetensi ASN		1	BKD	280 orang	229.380.000			2		
	<b>KEGIATAN</b>											
5.04.02.2.02	<b>2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional</b>			<b>BKD</b>	<b>80%</b>	<b>697.482.250</b>	<b>DAU</b>		<b>76,66%</b>	<b>813.320.200</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
5.04.02.2.02.05	a. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga			BKD	1 dokumen	<b>112.000.000</b>	DAU	16 orang Pejabat eselon II yang belum mengikuti PKN	2 Dokumen	<b>138.600.000</b>	DAU
		Seleksi JPT Pratama		1	BKD	16 laporan	112.000.000			18		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.04.02.2.02.07	b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			BKD	46 Laporan	<b>585.482.250</b>	DAU	Jenis Diklat yang wajib diikuti oleh ASN	676 Laporan	<b>674.720.200</b>	DAU
			Upah Tenaga Kerja Bulanan	1	BKD	2 org/ bulan	43.200.000					
			Penyelenggaraan dan fasilitasi Seleksi Terbuka JPT Pratama	2	BKD	16 org	89.675.000					
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	3	BKD	30 org	452.607.250					
	<b>URUSAN</b>											
	<b>III URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>											
	<b>PROGRAM</b>											
X.X X.01	<b>C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>			<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>6.271.686.601</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>6.912.372.561</b>	<b>DAU</b>
	<b>KEGIATAN</b>											
X.X X.01 .2.01	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>			<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>19.500.000</b>	<b>DAU</b>	<b>42917000 (30 jt)</b>	<b>100%</b>	<b>21.450.000</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX .01.2 .01.0 1	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			BKD	2 Dokumen	<b>6.000.000</b>	DAU		3 Dokumen	<b>6.600.000</b>	DAU
			Penyusunan dokumen renja	1		1 dokumen	3.000.000					
			Penyusunan dokumen renja perubahan	2		1 dokumen	3.000.000					
X.XX .01.2 .01.0 2	b. Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			BKD	1 Dokumen	<b>4.000.000</b>	DAU		1 Dokumen	<b>4.400.000</b>	DAU
			Penyusunan Dokumen RKA	1		1 Dokumen	4.000.000					
X.XX .01.2 .01.0 3	c. Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			BKD	1 Dokumen	<b>2.000.000</b>	DAU		2 Dokumen	<b>2.200.000</b>	DAU
			Penyusunan Dokumen perubahan RKA	1		1 dokumen	2.000.000					
X.XX .01.2 .01.0 6	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			BKD	5 Laporan	<b>2.000.000</b>	DAU		1 Laporan	<b>2.200.000</b>	DAU
			Penyusunan LKJiP	1		5 Laporan	2.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01.2.01.07	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			BKD	13 Laporan	<b>5.500.000</b>	DAU		9 Laporan	<b>6.050.000</b>	DAU
			Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja	1		13 Laporan	5.500.000					
	<b>KEGIATAN</b>											
X.XX.01.2.02	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>4.966.071.058</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>5.462.678.164</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
X.XX.01.2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			BKD	51 Orang /12 Bulan	<b>4.894.083.058</b>	DAU		55 Orang /12 Bulan	<b>5.383.491.364</b>	DAU
			Pembayaran gaji dan tunjangan	1		51 Orang /12 Bulan	4.894.083.058					
X.XX.01.2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			BKD	12 Dokumen	<b>67.488.000</b>	DAU		12 Dokumen	<b>74.236.800</b>	DAU
			Pembayaran Honorarium Penatausahaan	1		12 Dokumen	67.488.000					
X.XX.01.2.02.04	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			BKD	1 Dokumen	<b>1.000.000</b>	DAU		1 Dokumen	<b>1.100.000</b>	DAU
			Penyusunan Laporan Akuntansi	1		1 Dokumen	1.000.000					
X.XX.01.2.02.05	d. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan			BKD	1 Laporan	<b>2.000.000</b>	DAU		1 Laporan	<b>2.200.000</b>	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		1 Laporan	2.000.000					
X.XX 01.2 02.0 7	e. Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	1	BKD	12 Laporan	1.500.000	DAU		12 Laporan	1.650.000	DAU
	<b>KEGIATAN</b>											
X.X X.01 .2.03	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			BKD	100%	1.000.000	DAU		100%	1.500.000	DAU
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
X.XX 01.2 03.0 5	b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	1	BKD	2 Laporan	1.000.000	DAU		2 Laporan	1.500.000	DAU
	<b>KEGIATAN</b>											
X.X X.01 .2.05	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			BKD	100%	4.917.000	DAU		100%	4.917.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
X.XX .01.2 .05.0 3	b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			BKD	1 Dokumen	<b>4.917.000</b>	DAU		1 Dokumen	<b>4.917.000</b>	DAU
		Fasilitasi Pendataan dan Pengolahan Dokumen Kepegawaian	1			1 Dokumen	4.917.000					
	<b>KEGIATAN</b>											
X.X X.01 .2.06	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>340.738.943</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>387.700.237</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>											
X.XX .01.2 .06.0 1	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			BKD	1 Paket	<b>14.902.527</b>	DAU		1 Paket	<b>16.392.780</b>	DAU
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1		BKD	1 Paket	14.902.527					
X.XX .01.2 .06.0 4	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			BKD	5 Paket	<b>133.404.908</b>	DAU	157.307.010	5 Paket	<b>159.539.499</b>	DAU
		Penyediaan ATK	1		BKD	1 paket	84.418.610					
		Penyediaan Bahan-bahan lainnya	2		BKD	1 paket	14.395.368					
		Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3		BKD	1 paket	22.769.430					
		Penyediaan Benda Pos	4		BKD	1 paket	2.000.000					
		Penyediaan Natura dan Pakan Natura	5		BKD	1 paket	9.821.500					
X.XX .01.2	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan			BKD	2 Paket	<b>25.133.508</b>	DAU		1 Paket	<b>27.718.159</b>	DAU
		Penyediaan Barang Cetak	1		BKD	1 paket	21.803.508					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06.05		Penggandaan yang Disediakan	Penggandaan	2	BKD	1 paket	3.330.000					
X.XX 01.2 06.0 7	d. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			BKD	2 Paket	<b>13.761.000</b>	DAU		2 Paket	<b>15.137.100</b>	DAU
			Penyediaan BBM Genset	1	BKD	1 Paket	12.670.000					
			Penyediaan Isi Ulang Apar	2	BKD	1 Paket	1.091.000					
X.XX 01.2 06.0 8	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			BKD	12 Laporan	<b>10.000.000</b>	DAU		12 Laporan	<b>11.000.000</b>	DAU
			Penyediaan makmin tamu	1	BKD	12 Laporan	10.000.000					
X.XX 01.2 06.0 9	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			BKD	12 Laporan	<b>143.537.000</b>	DAU		12 Laporan	<b>157.912.700</b>	DAU
			Perjalanan Dinas	1	BKD	12 laporan	126.257.000					
			Penyediaan makmin Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	BKD	12 laporan	17.280.000					
			<b>KEGIATAN</b>									
X.X X.01 2.07	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>37.079.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>40.786.900</b>	<b>DAU</b>
			<b>SUB. KEGIATAN</b>									
X.XX 01.2 07.0 6	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			BKD	2 Unit	<b>37.079.000</b>	DAU		2 Unit	<b>40.786.900</b>	DAU
			Alat rumah tangga	1		1 paket	5.000.000					
			Penyediaan Printer ID card	2	BKD	1 Unit	32.079.000					
			<b>KEGIATAN</b>									
X.X X.01 2.08	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>693.441.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>763.341.700</b>	<b>DAU</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Penunjang Operasional Kantor</b>										
		<b>SUB. KEGIATAN</b>										
X.XX 01.2 08.0 1	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			BKD	12 Laporan	<b>3.891.000</b>	DAU		12 Laporan	<b>4.280.100</b>	DAU
		Pengiriman Surat	1	BKD	12 Laporan	3.891.000						
X.XX 01.2 08.0 2	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			BKD	12 Laporan	<b>349.494.000</b>	DAU		12 Laporan	<b>385.000.000</b>	DAU
		Penyediaan Jasa Listrik	1	BKD	12 Laporan	173.539.200						
		Penyediaan Jasa Air	2	BKD	12 Laporan	36.000.000						
		Penyediaan Jasa Internet	3	BKD	12 Laporan	138.754.800						
		Penyediaan Jasa Telepon	4	BKD	12 Laporan	1.200.000						
X.XX 01.2 08.0 4	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			BKD	12 Laporan	<b>340.056.000</b>	DAU		12 Laporan	<b>374.061.600</b>	DAU
		Pembayaran TKB		BKD	14 laporan	297.600.000						
		Pembayaran iuran Jaminan Asuransi		BKD	29 laporan	42.456.000						
		<b>KEGIATAN</b>										
X.X X.01 2.09	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>208.939.600</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>229.998.560</b>	<b>DAU</b>
		<b>SUB. KEGIATAN</b>										
X.XX 01.2 09.0 2	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan			BKD	31 Unit	<b>142.389.600</b>	DAU		31 Unit	<b>156.628.560</b>	DAU
		Pembayaran pajak kendaraan		BKD	33 unit	8.744.300						
		Pembayaran perijinan kendaraan		BKD	10 unit	4.600.000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Parkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pembayaran jasa pemeliharaan kendaraan operasional		BKD	3 unit	49.924.800					
			Pembayaran pengadaan BBM		BKD	4595 liter	79.120.500					
X.XX.01.2.09.06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			BKD	78 Unit	<b>66.550.000</b>	DAU		80 Unit	<b>73.370.000</b>	DAU
			Pemeliharaan Alat pendingin	1	BKD	22 unit	13.200.000					
			Pemeliharaan Unit- Personal komputer	2	BKD	35 unit	24.500.000					
			Pemeliharaan Peralatan Komputer	3	BKD	20 unit	13.000.000					
			Pemeliharaan genset	4	BKD	1 unit	15.850.000					
<b>TOTAL</b>							<b>8.136.145.411</b>	<b>DAU</b>			<b>9.087.165.103</b>	<b>DAU</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Rencana Kerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD tahun 2024 mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra PD tahun 2024-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024 terdiri dari 2 program utama dan 1 program penunjang sebagaimana berikut :

Tabel 4.1  
Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Lumajang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	<b>URUSAN</b>					
<b>5.03</b>	<b>I KEPEGAWAIAN</b>					
	<b>PROGRAM</b>					
<b>5.03.02</b>	<b>A. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks kualifikasi pendidikan ASN</b>	<b>BKD</b>	<b>13,00</b>	<b>518.287.560</b>	<b>DAU</b>
		<b>Indeks Kinerja ASN</b>	<b>BKD</b>	<b>25,75</b>	<b>99.582.000</b>	<b>DAU</b>
		<b>Indeks Disiplin ASN</b>	<b>BKD</b>	<b>4,95</b>	<b>93.414.000</b>	<b>DAU</b>
		<b>Indeks Kompetensi ASN</b>	<b>BKD</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>
				<b>78,70</b>	<b>711.283.560</b>	
	<b>KEGIATAN</b>					
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Rasio Ketersediaan ASN</b>	<b>BKD</b>	<b>53,1</b>	<b>347.810.560</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
<b>5.03.02.2.01.02</b>	a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKD	3 Dokumen	<b>8.100.000</b>	DAU
			BKD	3 Dokumen	8.100.000	
<b>5.03.02.2.01.03</b>	b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKD	750 Dokumen / ASN	<b>207.612.560</b>	DAU
			BKD	1 org/ bulan	21.600.000	
			BKD	1 kegiatan	1.125.000	
			BKD	750 org	106.540.000	
			BKD	750 org	78.347.560	
<b>5.03.02.2.01.06</b>	c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	450 Dokumen	<b>28.750.000</b>	DAU
			BKD	1 org/ bulan	20.400.000	
			BKD	1 kegiatan	8.350.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.2.01.08	e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	BKD	4 Lembaga	<b>45.576.000</b>	DAU
			BKD	2 org/ bln	43.200.000	
			BKD	1000 Id Card	2.376.000	
5.03.02.2.01.10	f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	11 Dokumen	<b>30.000.000</b>	DAU
			BKD	11 paket	30.000.000	
5.03.02.2.01.11	g. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	12 Dokumen	<b>23.856.000</b>	DAU
			BKD	1 org/ bln	20.400.000	
			BKD	12 dokumen	3.456.000	
5.03.02.2.01.12	h. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	2 Laporan	<b>3.916.000</b>	DAU
			BKD	2 Laporan	3.916.000	
	<b>KEGIATAN</b>					
5.03.02.2.02	<b>2. Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Penataan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat sesuai Persyaratan</b>	<b>BKD</b>	<b>65%</b>	<b>170.477.000</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
5.03.02.2.02.01	a. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	BKD	12 Dokumen	<b>117.780.000</b>	DAU
			BKD	12 fasilitasi	48.300.000	
			BKD	12 laporan	8.100.000	
			BKD	8 kegiatan	47.240.000	
			BKD	4 kegiatan	14.140.000	
5.03.02.2.02.02	b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD	6 Dokumen	<b>19.977.000</b>	DAU
			BKD	1 kegiatan	12.400.000	
			BKD	6 fasilitasi	7.577.000	
5.03.02.2.02.03	c. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKD	4 Dokumen	<b>32.720.000</b>	DAU
			BKD	1 org/ bln	20.400.000	
			BKD	1 kegiatan	9.330.000	
			BKD	1 kegiatan	2.990.000	
	<b>KEGIATAN</b>					
5.03.02.2.04	<b>3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang terevaluasi Kinerjanya</b>	<b>BKD</b>	<b>92%</b>	<b>99.582.000</b>	<b>DAU</b>
			<b>BKD</b>	<b>4,50%</b>	<b>93.414.000</b>	<b>DAU</b>
					<b>192.996.000</b>	
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
5.03.02.2.04.02	a. Pelaksanaan Penilaian dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan	BKD	7053 Dokumen	<b>88.200.000</b>	DAU
			BKD	2 Orang	43.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Kinerja Aparatur	BKD	5 Kegiatan	45.000.000	
5.03.02.2.04.03	b. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKD	2 Laporan	<b>11.382.000</b>	DAU
				2 laporan	11.382.000	
5.03.02.2.04.05	d. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKD	200 Orang	5.884.000	DAU
				200 Orang	5.884.000	
5.03.02.2.04.07	e. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKD	800 Orang	<b>73.400.000</b>	DAU
			BKD	2 Orang	42.000.000	
			BKD	800 Orang	16.400.000	
			BKD	300 buku	15.000.000	
5.03.02.2.04.08	f. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKD	60 Laporan	<b>5.580.000</b>	DAU
			BKD	60 Dokumen	780.000	
			BKD	30 laporan	4.800.000	
5.03.02.2.04.09	g. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKD	30 Dokumen	<b>8.550.000</b>	DAU
			BKD	30 fasilitasi	8.550.000	
	<b>URUSAN</b>					
5.04	<b>II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM</b>					
	<b>B. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEGIATAN</b>	<b>Persentase Pengembangan SDM</b>	<b>BKD</b>	<b>50%</b>	<b>1.153.175.250</b>	<b>DAU</b>
5.04.02.2.01	<b>1. Pengembangan Kompetensi Teknis SUB. KEGIATAN</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>BKD</b>	<b>8%</b>	<b>455.693.000</b>	<b>DAU</b>
5.04.02.2.01.03	a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKD	40 Orang	<b>226.313.000</b>	DAU
			BKD	2 org/ bln	40.800.000	
			BKD	40 orang	185.513.000	
5.04.02.2.01.04	b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	BKD	40 Dokumen	<b>229.380.000</b>	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKD	280 orang	229.380.000	
	<b>KEGIATAN</b>					
5.04.02.2.02	<b>2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional</b>	<b>BKD</b>	<b>80%</b>	<b>697.482.250</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
5.04.02.2.02.05	a. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	BKD	1 dokumen	<b>112.000.000</b>	DAU
			BKD	16 laporan	112.000.000	
5.04.02.2.02.07	b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKD	46 Laporan	<b>585.482.250</b>	DAU
			BKD	2 org/bulan	43.200.000	
			BKD	16 org	89.675.000	
			BKD	30 org	452.607.250	
	<b>URUSAN</b>					
	<b>III URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>					
	<b>PROGRAM</b>					
X.XX.X.01	<b>C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>6.271.686.601</b>	<b>DAU</b>
	<b>KEGIATAN</b>					
X.XX.X.01.2.01	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>19.500.000</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.XX.01.2.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKD	2 Dokumen	<b>6.000.000</b>	DAU
				1 dokumen	3.000.000	
				1 dokumen	3.000.000	
X.XX.01.2	b. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	BKD	1 Dokumen	<b>4.000.000</b>	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
01.02	Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	4.000.000	
X.XX 01.2 01.0 3	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKD	1 Dokumen	<b>2.000.000</b>	DAU
				1 dokumen	2.000.000	
X.XX 01.2 01.0 6	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	5 Laporan	<b>2.000.000</b>	DAU
				5 Laporan	2.000.000	
X.XX 01.2 01.0 7	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKD	13 Laporan	<b>5.500.000</b>	DAU
				13 Laporan	5.500.000	
	<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.01 2.02	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>4.966.071.058</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.XX 01.2 02.0 1	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	51 Orang /12 Bulan	<b>4.894.083.058</b>	DAU
				51 Orang /12 Bulan	4.894.083.058	
X.XX 01.2 02.0 2	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	12 Dokumen	<b>67.488.000</b>	DAU
				12 Dokumen	67.488.000	
X.XX 01.2 02.0 4	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKD	1 Dokumen	<b>1.000.000</b>	DAU
				1 Dokumen	1.000.000	
X.XX 01.2 02.0 5	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKD	1 Laporan	<b>2.000.000</b>	DAU
				1 Laporan	2.000.000	
X.XX 01.2 02.0 7	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	BKD	12 Laporan	<b>1.500.000</b>	DAU
			BKD	12 Laporan	1.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		<b>KEGIATAN</b>				
X.X X.01 2.03	<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>DAU</b>
		<b>SUB. KEGIATAN</b>				
X.XX 01.2 03.0 5	b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKD	2 Laporan	<b>1.000.000</b>	DAU
			BKD	2 Laporan	1.000.000	DAU
		<b>KEGIATAN</b>				
X.X X.01 2.05	<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>4.917.000</b>	<b>DAU</b>
		<b>SUB. KEGIATAN</b>				
X.XX 01.2 05.0 3	b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKD	1 Dokumen	<b>4.917.000</b>	DAU
				1 Dokumen	4.917.000	
		<b>KEGIATAN</b>				
X.X X.01 2.06	<b>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>340.738.943</b>	<b>DAU</b>
		<b>SUB. KEGIATAN</b>				
X.XX 01.2 06.0 1	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKD	1 Paket	<b>14.902.527</b>	DAU
			BKD	1 Paket	14.902.527	
X.XX 01.2 06.0 4	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKD	5 Paket	<b>133.404.908</b>	DAU
			BKD	1 paket	84.418.610	
			BKD	1 paket	14.395.368	
			BKD	1 paket	22.769.430	
			BKD	1 paket	2.000.000	
			BKD	1 paket	9.821.500	
X.XX 01.2 06.0 5	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKD	2 Paket	<b>25.133.508</b>	DAU
			BKD	1 paket	21.803.508	
			BKD	1 paket	3.330.000	
X.XX 01.2 06.0 7	d. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BKD	2 Paket	<b>13.761.000</b>	DAU
			BKD	1 Paket	12.670.000	
			BKD	1 Paket	1.091.000	
X.XX 01.2 06.0 8	e. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BKD	12 Laporan	<b>10.000.000</b>	DAU
			BKD	12 Laporan	10.000.000	
X.XX 01.2 06.0 9	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	BKD	12 Laporan	<b>143.537.000</b>	DAU
			BKD	12 laporan	126.257.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
		dan Konsultasi SKPD	BKD	12 laporan	17.280.000	
	<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.01 2.07	<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>37.079.000</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.XX 01.2 07.0 6	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKD	2 Unit	<b>37.079.000</b>	DAU
				1 paket	5.000.000	
			BKD	1 Unit	32.079.000	
	<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.01 2.08	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>693.441.000</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.XX 01.2 08.0 1	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	12 Laporan	<b>3.891.000</b>	DAU
			BKD	12 Laporan	3.891.000	
X.XX 01.2 08.0 2	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKD	12 Laporan	<b>349.494.000</b>	DAU
			BKD	12 Laporan	173.539.200	
			BKD	12 Laporan	36.000.000	
			BKD	12 Laporan	138.754.800	
			BKD	12 Laporan	1.200.000	
X.XX 01.2 08.0 4	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKD	12 Laporan	<b>340.056.000</b>	DAU
			BKD	14 laporan	297.600.000	
			BKD	29 laporan	42.456.000	
	<b>KEGIATAN</b>					
X.X X.01 2.09	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BKD</b>	<b>100%</b>	<b>208.939.600</b>	<b>DAU</b>
	<b>SUB. KEGIATAN</b>					
X.XX 01.2 09.0 2	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKD	31 Unit	<b>142.389.600</b>	DAU
			BKD	33 unit	8.744.300	
			BKD	10 unit	4.600.000	
			BKD	3 unit	49.924.800	
			BKD	4595 liter	79.120.500	
X.XX 01.2 09.0 6	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKD	78 Unit	<b>66.550.000</b>	DAU
			BKD	22 unit	13.200.000	
			BKD	35 unit	24.500.000	
			BKD	20 unit	13.000.000	
			BKD	1 unit	15.850.000	
<b>TOTAL</b>					<b>8.136.145.411</b>	<b>DAU</b>



#### **4.2. Pendanaan Perangkat Daerah**

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2024 telah ditetapkan, sebesar **Rp 8.136.145.411,00** dengan rincian Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan rincian per program yaitu :

- a. Program Kepegawaian Daerah dengan alokasi pagu anggaran Rp 711.283.560,00 Dana Alokasi Umum (DAU);
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi dana Rp 1.153.175.250,00 Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi dana Rp 6.271.686.601,00 Dana Alokasi Umum (DAU).

## **BAB V**

### **PENUTUP**


Renja PD tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan sebagai landasan operasional program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang serta bertujuan untuk mencapai target kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra PD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Dan dalam Renja PD ini berisi kaidah – kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program – program dalam Renja PD tahun 2024 ini secara murni dan komitmen berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat.
2. Seluruh unit kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban menjaga keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Lumajang;
3. Seluruh unit kerja hendaknya :
  - a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di masing-masing Unit Kerja;
  - b. Membuat Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai dengan DPA;
  - c. Menyusun Rencana aksi program dan kegiatan;
  - d. Melaksanakan evaluasi internal program dan kegiatan setiap tribulan atas pencapaian target kinerja;

Demikian penyusunan Renja PD tahun 2024 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Lumajang, Juni 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.  
NIP. 19660710 199203 1 007